

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 masih dalam tahap pemulihan perekonomian secara gradual. Perekonomian nasional tahun 2017 tumbuh 5,07 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,03 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi pada 2017 merupakan yang tertinggi dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Peningkatan pertumbuhan ditopang oleh perbaikan ekspor dan investasi. Perbaikan pendapatan memberikan dukungan pada konsumsi rumah tangga sehingga tetap memberikan kontribusi pertumbuhan yang tinggi dengan pangsa sekitar 54% terhadap perekonomian nasional. Perbaikan pertumbuhan ekspor nasional sebesar 9,09% (yoy) didorong oleh pemulihan ekonomi global yang semakin kuat. Realisasi pertumbuhan ekspor tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara, perbaikan pertumbuhan investasi pada 2017 menjadi sebesar 6,15% (yoy), dari pertumbuhan 2016 sebesar 4,47% (yoy), didorong oleh percepatan realisasi proyek infrastruktur Pemerintah, khususnya sejak semester II 2017. Secara sektoral, perbaikan ekonomi terutama terjadi pada lapangan usaha yang terkait dengan aktivitas ekspor dan investasi Pemerintah. Kontribusi tertinggi berasal dari LU industri pengolahan yang memiliki pangsa lebih dari 21% terhadap perekonomian. Perbaikan kinerja ekspor tercermin pada LU pertanian, khususnya perkebunan, serta lapangan usaha industri pengolahan. Selanjutnya, percepatan berbagai proyek infrastruktur menopang perbaikan kinerja LU konstruksi. Secara spasial, perbaikan kinerja perekonomian nasional pada 2017 ditopang oleh peningkatan pertumbuhan di seluruh kawasan.

Perekonomian Sumatera pada keseluruhan tahun 2017 tumbuh 4,30% (yoy), membaik dibandingkan tahun 2016 yang tumbuh sebesar

4,29% (yoy). Perbaikan ekonomi Sumatera ditopang oleh peningkatan kinerja ekspor dan belanja pemerintah. Ekspor barang dan jasa pada tahun 2017 tumbuh 7,99% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mengalami kontraksi 0,89% (yoy). Peningkatan ekspor dipengaruhi oleh dorongan faktor eksternal yaitu kenaikan harga komoditas CPO, karet dan batu bara. Konsumsi pemerintah di tahun 2017 tumbuh 4,52% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2016 yang mengalami kontraksi 0,88% (yoy). Peningkatan konsumsi Pemerintah tercermin dari perbaikan serapan APBD pada 2017 (80,6%) dibandingkan 2016 (66,9%). Secara sektoral, perbaikan ekonomi Sumatera terutama terjadi pada LU yang terkait dengan aktivitas ekspor dan belanja Pemerintah. Perbaikan ekspor Sumatera tercermin pada LU pertanian, khususnya sub-LU tanaman bahan makanan dan perkebunan. Lapangan usaha pertanian pada 2017 tumbuh 3,93% (yoy), meningkat dibandingkan 2016 yang sebesar 3,77% (yoy). Perbaikan ekspor juga mendorong peningkatan pada LU perdagangan. Pertumbuhan LU perdagangan pada 2017 mencapai 6,16% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 2016 yang tumbuh 5,88% (yoy).

Tabel 3-1
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan tahun 2016-2018 (persen)

Uraian	2016	2017*	2018**
Pertumbuhan PDB	5,0	5,07	5,4
Konsumsi RT	5,0	4,93	5,1
Konsumsi LPNRT	6,6	6,01	5,8
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	3,46	4,0-6,4
Investasi (PMTB)	4,5	7,11	6,3
Ekspor barang dan jasa	(1,7)	17,27	
Impor Barang dan jasa	(2,3)	15,09	

Sumber : Ekspose Bappenas, 2018

*Hingga Triwulan III

**APBN 2018

Tahun 2018, pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik dibandingkan tahun 2017 pada kisaran 5,1 – 5,5 persen (yoy). Momentum positif perekonomian global dan domestik pada 2017 diperkirakan menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi 2018. Dari sisi domestik dukungan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama berasal dari investasi dan ekspor. Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 terutama akan ditopang oleh lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Secara spasial, dorongan pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh perbaikan di semua wilayah.

Pertumbuhan ekonomi Sumatera pada 2018 diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan 2017 di kisaran 4,2%-4,6%. Peningkatan pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan konsumsi Pemerintah. Dorongan konsumsi rumah tangga dan Pemerintah dipengaruhi oleh penyelenggaraan Asian Games 2018, dan pelaksanaan Pilkada serentak. Namun pertumbuhan ekspor Sumatera diperkirakan tidak sekuat 2017, karena pengaruh harga komoditas ekspor seperti CPO dan karet diperkirakan menurun. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi Sumatera akan ditopang oleh lapangan usaha pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Perbaikan lapangan usaha pertanian ditopang oleh kinerja pertanian tabama seiring pola tanam yang kembali normal karena faktor cuaca yang lebih kondusif. Sementara dorongan industri pengolahan didukung oleh peningkatan produk olahan seiring beroperasinya beberapa smelter baru. Selanjutnya lapangan usaha perdagangan akan meningkat seiring penyelenggaraan event Asian Games dan Pilkada serentak 2018.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi ke depan masih bertumpu pada sektor pertanian yang kontribusinya masih dominan terhadap perekonomian. Pentingnya kedudukan sumber daya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam secara tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi

kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut, maka pengenalan akan potensi yang dimiliki menjadi sangat penting dan strategis untuk pengembangan lebih lanjut, karena dengan mengetahui potensi yang ada, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat menjanjikan dimasa depan, karena potensinya demikian besar dan merupakan sektor yang *renewable* dengan pertumbuhan yang relatif konstan, tetapi kontribusinya masih relatif kecil.

Dalam rangka menyusun kerangka kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2019 khususnya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, maka kondisi ekonomi makro Provinsi Jambi menjadi hal yang penting untuk dianalisa agar penyusunan arah kebijakan kedepan memiliki dasar yang kuat dan memiliki implikasi yang positif terhadap penyusunan kerangka perencanaan pembangunan daerah. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Dari kondisi makro ekonomi dan didukung dengan kerangka pendanaan yang realistik, akan lebih memfokuskan dalam pengalokasian sumberdaya yang didukung penyusunan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai program dan kegiatan yang bersinergis dalam kerangka pencapaian visi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 : ***JAMBI YANG TERTIB, UNGGUL, NYAMAN, TANGGUH, ADIL DAN SEJAHTERA***

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Perkembangan perekonomian suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari interaksi aktivitas ekonomi baik dalam skala lokal, regional, nasional dan aktivitas ekonomi internasional yang saling tarik menarik dan memiliki korelasi antar satu dengan yang lainnya. Aktivitas

ekonomi yang semakin terbuka dewasa ini, pada akhirnya juga dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun internasional, baik itu menyangkut kebijakan pemerintah di sektor moneter maupun sektor riil, maupun pengaruh perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh kondisi keuangan global yang diyakini akan berdampak berbagai aktivitas dan sektor ekonomi di daerah.

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Provinsi Jambi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang sebesar 4,37 persen menjadi 4,64 persen (yoy). Kenaikan tersebut terjadi pada seluruh lapangan usaha termasuk sektor utama yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (5,43 persen), Pertambangan dan Penggalian (3,77 persen) serta Industri Pengolahan (3,02 persen). Pertumbuhan sektor utama didorong oleh pemulihan ekonomi global serta ketersediaan bahan baku yang mencukupi di sisi domestik. Sektor yang mencatat pertumbuhan paling tinggi sepanjang tahun 2017 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,95 persen, Konstruksi (7,22 persen) serta Informasi dan Komunikasi (6,60 persen). Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sejalan dengan peningkatan jumlah tamu hotel menginap yang naik sebesar 53,62 persen dibanding tahun 2016 menjadi 367.750 orang tamu pada tahun 2017. Perbaikan sektor Konstruksi didukung oleh pesatnya pembangunan infrastruktur, sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi dipengaruhi oleh maraknya perkembangan teknologi digital.

Tabel 3-2
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2016-2017 dan
Prediksi Tahun 2018 (persen)

Uraian	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,59	5,43
Pertambangan dan penggalian	0,44	3,77
Industri pengolahan	2,29	3,02
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	6,16	1,70
Pengadaan air	5,02	2,60
Konstruksi	3,54	7,22
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6,27	4,33
Transportasi dan pergudangan	8,29	5,91
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,65	7,95
Informasi dan komunikasi	8,51	6,60
Jasa keuangan	10,38	3,06
Real estate	4,31	4,61
Jasa perusahaan	5,24	4,32
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	3,01	2,52
Jasa pendidikan	6,04	4,24
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,64	5,49
Jasa lainnya	6,59	4,54

Sumber : BPS, 2017.

Berdasarkan strukturnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017 didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB, yaitu sebesar 29,41 persen. Diikuti oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,66 persen. Hal tersebut secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-3
Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Berlaku (persen)

Uraian	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,80	29,41
Pertambangan dan penggalian	16,60	17,66
Industri pengolahan	10,48	10,28
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06
Pengadaan air	0,14	0,14
Konstruksi	7,03	6,96
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	12,16	12,12
Transportasi dan pergudangan	3,35	3,26
Penyedia akomodasi dan makan minum	1,18	1,20
Informasi dan komunikasi	3,76	3,87
Jasa keuangan	2,53	2,45
Real estate	1,59	1,55
Jasa perusahaan	1,21	1,20
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,71	4,48
Jasa pendidikan	3,34	3,30
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,10	1,09
Jasa lainnya	0,97	0,96

Sumber : BPS, 2017.

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.1.1.2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha

Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2017 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp191.098 Milyar, sementara berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 mencapai Rp136.556 Milyar. Kontribusi terbesar tidak menunjukkan pergeseran secara signifikan. Sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan;

Pertambangan dan Penggalian, serta Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi Mobil dan sepeda Motor mendominasi PDRB Provinsi Jambi dengan nilai masing-masing sebesar Rp56.199 Milyar; Rp33.741 Milyar; serta Rp23.164 Milyar.

PDRB menurut lapangan usaha atas Dasar Harga Berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp19.444 Milyar atau meningkat sebesar 4,64 persen dari PDRB tahun 2016 (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (dari Rp2.033 Milyar menjadi Rp2.293 Milyar).

Secara sektoral, kinerja sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2017 dipengaruhi oleh stabilnya harga komoditas di tingkat lokal yang berdampak pada produk unggulan Provinsi Jambi yaitu karet dan kelapa sawit. Meskipun harga rata-rata karet internasional sebesar USD 189,73/kg, namun harga rata-rata boka naik menjadi Rp16.556,34/kg pada akhir triwulan IV tahun 2017.

Melemahnya perkembangan harga karet internasional merupakan efek lanjutan dari masih tingginya jumlah persediaan atau cadangan karet di negara importir utama seperti Tiongkok dan Jepang. Sedangkan, meningkatnya harga karet di tingkat lokal didorong oleh upaya pemerintah menjaga jumlah pasokan dan melakukan intervensi pasar melalui proses lelang.

Sejalan dengan harga karet lokal, harga rata-rata TBS kelapa sawit usia 10 tahun juga mengalami peningkatan terutama di akhir triwulan tahun 2017, meskipun harga rata-rata CPO internasional tercatat mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 8,35 persen (yoy). Perbaikan harga TBS dipicu oleh berkurangnya persediaan bahan baku di pabrik sehingga mendorong kenaikan permintaan minyak inti sawit. Sementara, pelemahan harga CPO internasional dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah India yang menaikkan pajak impor minyak sawit dua kali lipat lebih tinggi pada tahun 2017. Selain itu, penurunan ekspor CPO Malaysia

seiring penguatan mata uang Ringgit Malaysia juga menahan perbaikan harga CPO di pasar internasional.

Untuk sektor Pertambangan dan Penggalian, pertumbuhannya didorong oleh tren positif kenaikan harga minyak dan batu bara di pasar internasional. Meningkatnya harga komoditas batu bara dipicu oleh tingginya kebutuhan energi pada beberapa negara terutama saat mulai memasuki musim dingin terutama Tiongkok. Cuaca buruk pada musim dingin juga menjadi faktor penghambat produksi dan distribusi di negara tersebut, sehingga pasokan berkurang dan mendorong peningkatan harga komoditas. Kenaikan *demand* di tengah terbatasnya *supply* mengakibatkan harga batu bara internasional meningkat. Sementara, naiknya harga minyak mentah terutama pada akhir triwulan 2017 merupakan dampak dari penurunan *inventory* minyak mentah dan bahan bakar cair lainnya secara global. Kesepakatan OPEC dan Rusia yang memperpanjang pembatasan produksi hingga akhir tahun 2018 menjadi salah satu pemicu naiknya harga minyak dunia. Faktor lain kenaikan harga minyak dunia dipengaruhi oleh penutupan jaringan pipa utama di Laut Utara Inggris akibat keretakan pipa yang menyebabkan makin menurunnya pasokan minyak mentah. Disamping faktor harga komoditas pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian juga didukung oleh produksi migas di wilayah Jambi yang mengalami kenaikan pasca beroperasinya 3 sumur migas baru yang berlokasi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pertumbuhannya dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi lokal terutama disumbang oleh kenaikan harga komoditas unggulan daerah, baik hasil pertambangan maupun pertanian. Selain itu, juga dipengaruhi oleh meningkatnya penyaluran kredit kepemilikan kendaraan bermotor.

Untuk sektor ekonomi lainnya, seperti Sektor Transportasi Udara dan Pergudangan menunjukkan perkembangan yang stabil dari waktu ke

waktu, sejalan dengan tumbuhnya sektor *e-commerce* atau perdagangan elektronik yang berkaitan dengan penggunaan jasa transportasi udara dan pergudangan sebagai logistik.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tertinggi selama tahun 2017 dicapai oleh Komponen Ekspor yang mencapai 8,79 persen, diikuti oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 7,61 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,44 persen.

Meningkatnya Komponen Ekspor tersebut terutama bersumber dari kenaikan ekspor komoditas pertambangan sejalan dengan tren kenaikan harga migas dan batu bara internasional. Di sisi lain, meningkatnya pertumbuhan kelompok Investasi dan Konsumsi Rumah Tangga mampu mendorong akselerasi perekonomian Provinsi Jambi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-4
Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan tahun 2015-2017 (persen)

Uraian	2015	2016	2017
Pertumbuhan PDRB	4,23	4,43	4,64
Konsumsi RT	4,41	2,35	4,44
Konsumsi LPNRT	2,15	(4,01)	2,64
Konsumsi Pemerintah	(1,00)	5,37	3,28
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/ Investasi	(11,54)	(3,26)	7,61
Ekspor barang dan jasa	9,08	2,29	8,79
Impor Barang dan jasa	8,03	1,43	11,21

Sumber : BPS, 2017

Tabel 3-5
 Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	33.312,30	25,63	37.972,90	26,22	43.819,80	28,22	51.145,95	29,79	56.199,42	29,41
2	Pertambangan & penggalian	34.000,20	26,16	35.442,70	24,48	29.476,90	19,00	28.493,82	16,59	33.741,82	17,66
3	Industri pengolahan	14.489,40	11,15	15.841,40	10,94	17.134,40	11,05	17.986,47	10,47	19.638,55	10,28
4	Pengadaan Listrik dan gas	53,30	0,04	63,40	0,04	76,10	0,05	103,55	0,06	121,09	0,06
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	184,00	0,14	201,60	0,14	223,20	0,14	247,08	0,14	265,03	0,14
6	Konstruksi	8.818,70	6,78	10.280,70	7,10	11.168,20	7,20	12.065,94	7,03	13.307,99	6,96
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	12.046,50	9,27	14.167,10	9,78	17.250,00	11,12	20.871,36	12,15	23.164,52	12,12
8	Transportasi dan pergudangan	3.787,20	2,91	4.269,60	2,95	4.979,70	3,21	5.769,17	3,36	6.231,19	3,26

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.320,30	1,02	1.596,10	1,10	1.779,10	1,15	2.033,12	1,18	2.293,92	1,20
10	Informasi dan komunikasi	3.992,20	3,07	4.443,40	3,07	5.385,60	3,47	6.450,83	3,76	7.394,25	3,87
11	Jasa keuangan dan asuransi	3.255,70	2,50	3.541,00	2,45	3.769,20	2,43	4.349,69	2,53	4.676,21	2,45
12	Real estate	1.939,30	1,49	2.100,40	1,45	2.418,30	1,56	2.729,98	1,59	2.968,97	1,55
13	Jasa perusahaan	1.422,40	1,09	1.578,50	1,09	1.804,70	1,16	2.072,80	1,21	2.296,95	1,20
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.520,00	3,48	6.018,90	4,16	7.563,20	4,88	8.085,25	4,71	8.563,09	4,48
15	jasa pendidikan	4.427,50	3,41	4.522,70	3,12	5.111,00	3,30	5.758,53	3,35	6.309,03	3,30
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.222,70	0,94	1.471,30	1,02	1.667,20	1,07	1.888,74	1,10	2.091,76	1,09
17	jasa lainnya	1.184,40	0,91	1.295,90	0,89	1.483,60	0,96	1.659,14	0,97	1.834,91	0,96
18	PDRB	129.976,00	100,00	144.807,60	100,00	155.110,30	100,00	171.711,45	100,00	191.098,71	100,00

Sumber : BPS, 2017

Tabel 3-6

Nilai PDRB dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 di Provinsi Jambi Tahun 2013 – 2017

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	28.071,00	25,12	31.145,40	25,96	32.815,90	26,24	34.932,19	26,77	36.829,09	26,97
2	Pertambangan & penggalian	29.692,30	26,57	30.947,00	25,79	30.879,90	24,70	31.016,89	23,77	32.187,04	23,57
3	Industri pengolahan	13.005,70	11,64	13.630,70	11,36	13.948,80	11,16	14.267,74	10,93	14.698,67	10,76
4	Pengadaan Listrik dan gas	51,90	0,05	56,90	0,05	59,30	0,05	68,26	0,05	69,42	0,05
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	156,70	0,14	163,50	0,14	170,10	0,14	178,69	0,14	183,33	0,13
6	Konstruksi	7.857,50	7,03	8.559,60	7,13	8.806,00	7,04	9.156,96	7,02	9.818,05	7,19
7	Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	9.799,20	8,77	10.662,00	8,89	11.836,60	9,47	12.579,06	9,64	13.123,44	9,61
8	Transportasi dan pergudangan	3.319,90	3,03	3.669,40	3,06	3.911,20	3,13	4.235,23	3,25	4.485,55	3,28
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.033,10	0,92	1.226,60	1,02	1.306,20	1,04	1.406,11	1,08	1.517,93	1,11
10	Informasi dan komunikasi	3.622,40	3,24	3.876,30	3,23	4.257,50	3,40	4.619,68	3,54	4.924,70	3,61
11	Jasa keuangan dan asuransi	2.655,80	2,38	2.757,70	2,30	2.815,80	2,25	3.108,02	2,38	3.203,09	2,35

No	Sektor	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%	(Rp miliar)	%
12	Real estate	1.695,50	1,52	1.732,80	1,44	1.805,30	1,44	1.883,13	1,44	1.969,92	1,44
13	Jasa perusahaan	1.171,80	1,05	1.230,40	1,03	1.308,20	1,05	1.376,79	1,06	1.436,30	1,05
14	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	3.652,60	3,27	4.141,20	3,45	4.422,40	3,54	4.555,65	3,49	4.670,56	3,42
15	jasa pendidikan	3.705,00	3,31	3.752,60	3,13	4.033,40	3,23	4.277,11	3,28	4.458,49	3,26
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1.103,00	0,99	1.270,50	1,06	1.398,10	1,12	1.490,99	1,14	1.572,87	1,15
17	jasa lainnya	1.101,00	0,99	1.162,10	0,97	1.263,80	1,01	1.347,12	1,03	1.408,25	1,03
	PDRB	111.766,10	100,00	119.984,70	100,00	125.038,70	100,00	130.499,63	100,00	136.556,71	100,00

Sumber : BPS, 2017

3.1.1.3 Inflasi dan Proyeksi Inflasi

3.1.1.3.1 Inflasi

Inflasi Provinsi Jambi merupakan tercatat sebesar 2,83 persen (yoy), merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi sebesar 2,68 persen (yoy) dan Kabupaten Bungo sebesar 4,25 persen. Inflasi di Kota Jambi terutama disebabkan karena adanya kenaikan indeks harga pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 3,68 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 5,36 persen; Kelompok Sandang sebesar 3,82 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,72 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 4,70 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Keuangan sebesar 1,37 persen. Sementara Kelompok Bahan Makanan mengalami deflasi sebesar -0,09 persen.

Inflasi di Kota Muaro Bungo terutama disebabkan adanya kenaikan indeks harga pada semua kelompok pengeluaran, yang terdiri dari Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,33 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 5,38 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 7,23 persen; Kelompok Sandang sebesar 5,52 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,52 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 1,80 persen, dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Keuangan sebesar 3,93 persen.

Tabel 3-7
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, *Year on Year* Tahun 2015 - 2017

No	Inflasi	2015	2016	2017
1	Desember	0,91	0,36	1,52
2	Desember (Tahun Kalender)	1,37	4,54	2,68
3	Desember terhadap Desember (year on year)	1,37	4,54	2,68

Sumber: Berita Resmi BPS 2017

3.1.1.3.2 Proyeksi Inflasi

Inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2018 diproyeksi berada pada kisaran 3,79 persen – 4,19 persen, meningkat dibandingkan proyeksi inflasi Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar 2,83 persen (yoy), namun masih dalam target sasaran inflasi nasional yang sebesar $3,5 \pm 1$ persen (yoy). Inflasi

tersebut terutama bersumber dari kenaikan kelompok *administered price* seiring meningkatnya harga migas dan batu bara di pasar internasional yang berpotensi mendorong penyesuaian harga bahan bakar jenis subsidi maupun non subsidi serta tarif dasar listrik. Selain itu, tren kenaikan harga komoditas dan penyesuaian Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 diperkirakan akan mendorong kenaikan inflasi kelompok inti (*core inflation*).

Ke depan, beberapa potensi risiko yang dapat menyebabkan tekanan inflasi yang lebih tinggi dari prakiraan (*upside risk*) adalah faktor anomali cuaca yang mengganggu produksi hasil pertanian dan menghambat proses distribusi dari daerah penghasil, serta perubahan skema subsidi LPG 3 kg mulai Maret 2018 yang berpotensi mendorong naiknya permintaan bahan bakar rumah tangga. Di sisi lain, pengembangan sentra produksi pangan didukung dengan pembangunan infrastruktur dan konektivitas ke daerah sentra produksi di dalam wilayah Provinsi Jambi akan menahan laju inflasi.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2018 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,63 – 5,03 persen (yoy) atau sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2017 yang sebesar 4,64 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama akan bersumber dari peningkatan kinerja sektor ekonomi utama, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian, diikuti oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta sektor Industri Pengolahan. Pertumbuhan sektor ekonomi utama tersebut didorong oleh pulihnya perekonomian dunia yang lebih cepat dari perkiraan sehingga berpotensi meningkatkan permintaan bahan mentah dari negara maju. Hal tersebut sesuai dengan konsensus internasional pada Januari 2018 yang menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global menjadi sebesar 3,1 persen atau lebih tinggi 0,2 persen dibandingkan proyeksi sebelumnya pada Juni 2017. Perkiraan tersebut didasarkan pada prospek perekonomian Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin menguat pada tahun 2018. Di sisi domestik, kebijakan pemerintah terkait pengawasan dan pembatasan produksi batu bara secara ketat serta pemangkasan ekspor komoditas karet diperkirakan akan mempengaruhi

jumlah pasokan dunia yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga komoditas.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 terutama akan disumbangkan oleh pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga seiring peningkatan harga komoditas dunia yang memperkuat daya beli masyarakat. Selain itu, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan serta sektor Industri Pengolahan seiring meningkatnya produksi pertanian. Investasi juga akan tumbuh lebih baik sejalan dengan target Pemerintah Provinsi Jambi dalam mengembangkan sektor industri dan sektor pariwisata.

Resiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari perkiraan berkaitan dengan proteksi atau larangan ekspor karet dan CPO oleh negara importir terutama Eropa dan Amerika Serikat, kebijakan pengurangan impor batu bara oleh Tiongkok, lonjakan harga energi primer yang terlalu tinggi serta fluktuasi harga komoditas yang cenderung tidak stabil sehingga berpotensi mengalami koreksi. Sementara, resiko yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi adalah potensi pemulihan ekonomi global yang lebih cepat dari perkiraan sehingga mendorong peningkatan permintaan bahan mentah. Hal lain yang patut dicermati pada tahun 2018 adalah penyelenggaraan Pilkada serentak di tiga kabupaten/kota serta pendaftaran calon legislatif dan calon Presiden dalam rangka persiapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden Tahun 2019. Kontribusi pesta demokrasi terhadap perekonomian daerah diproyeksikan positif sepanjang stabilitas politik dan keamanan mampu dijaga dalam kondisi yang kondusif. Momentum tersebut diperkirakan akan mendorong akselerasi pertumbuhan Konsumsi LNPRRT dan Konsumsi Pemerintah di sisi pengeluaran dan di sisi sektoral terhadap sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor.

Tantangan yang dihadapi perekonomian nasional berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Adapun tantangan global yang dihadapi antara lain :

- a. Kebijakan proteksi yang diberlakukan oleh negara tujuan utama ekspor dengan menerapkan tarif impor yang sangat tinggi, pengenaan bea masuk *antidumping*, serta pelarangan dan pembatasan kuota impor dapat berdampak terhadap penurunan kinerja ekspor komoditas unggulan Provinsi Jambi.
- b. Resiko lonjakan harga energi primer seperti minyak, gas dan batu bara di pasar internasional akan meningkatkan beban subsidi sektor publik sehingga berpotensi mendorong kenaikan harga bahan bakar dan tarif listrik. Kenaikan tersebut akan menyebabkan peningkatan laju inflasi yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat.
- c. Pergerakan harga komoditas CPO dan karet intrnasional yang cenderung fluktuatif berpotensi mengalami koreksi ke bawah terutama dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar mata uang Ringgit Malaysia dan Yen Jepang yang menjadi acuan harga komoditas internasional. Harga komoditas yang tidak stabil cenderung akan menekan kinerja ekspor komoditas kelapa sawit dan karet yang merupakan produk unggulan daerah.
- d. Arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang melanjutkan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuan Federal Funds Rate berpotensi mengakibatkan arus modal keluar sehingga akan memicu kenaikan biaya dana dan gejolak harga saham di pasar keuangan yang berakibat menghambat investasi.
- e. Perlu diperhatikan juga kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang utama Indonesia yang akan mengalami perbaikan pertumbuhan lebih cepat dari perkiraan, Membaiknya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, China dan Jepang selaku mitra dagang utama Indonesia

akan mendorong peningkatan volume perdagangan luar negeri seiring melonjaknya permintaan bahan mentah.

Disamping itu, beberapa tantangan domestik yang dihadapi oleh Pemerintah yang berdampak terhadap perekonomian daerah, antara lain :

- a. Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal, yang disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Indikasi adanya efek crowding out seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian. Hal tersebut tentu saja berdampak terhadap perekonomian daerah terutama terkait dengan dana transfer pemerintah pusat di daerah.
- b. Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL).
- c. Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya partisipasi angkatan kerja dan rendahnya jumlah kuantitas dan kualitas infrastruktur.

Kondisi Provinsi Jambi Tahun 2018 masih terpengaruh oleh kondisi perekonomian dunia dan nasional, dengan tantangan terhadap perekonomian Provinsi Jambi adalah :

- Dampak terbukanya perdagangan bebas dan berlakunya *Asia Economic Community* (AEC);
- Pembangunan Infrastruktur strategis belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian Nasional;

- Dukungan Pemerintah Pusat belum sesuai dengan peran Provinsi Jambi terhadap perekonomian tersebut;
- Semakin meningkatnya kebutuhan terhadap barang impor bahan baku industry;
- Dampak pengurangan subsidi BBM dan kenaikan tarif listrik;
- Kebutuhan Infrastruktur perekonomian daerah semakin meningkat;
- Koordinasi pembangunan antar sektor belum optimal;
- Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam daerah;

Peluang yang dapat dimanfaatkan Provinsi Jambi antara lain meliputi :

- Terbukanya peluang pasar ekspor.
- Meningkatnya dukungan Program CSR dan PKBL.
- Meningkatnya pelayanan investasi.
- Tersedianya produk unggulan Provinsi Jambi yang berdaya saing.
- Relatif lebih tingginya upah buruh di Provinsi Jambi
- Provinsi Jambi sebagai penyangga pangan Nasional.
- Meningkatnya pengembangan sumberdaya energi baru terbarukan.
- Tersedianya tenaga kerja berkualitas.
- Komitmen dukungan pengembangan potensi wilayah.

Menyikapi kondisi perekonomian dan inflasi terkini, beberapa hal yang patut menjadi perhatian adalah:

1. Percepatan pembangunan ekonomi daerah dalam jangka pendek melalui:
 - a) Mendorong perbaikan kinerja sektor perkebunan melalui penciptaan pasar domestik dan melakukan inisiatif penjangkauan perluasan pasar ekspor. Pengembangan pasar domestik sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang akan mengembangkan pemanfaatan karet alam dalam pembangunan infrastruktur.

- b) Mendorong percepatan realisasi anggaran APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama anggaran belanja modal pemerintah terkait dengan pembangunan infrastruktur strategis (jalan, jembatan, saluran irigasi dan pelabuhan) dalam rangka peningkatan konektivitas dan perdagangan antar daerah.
- c) Mengoptimalkan program *cash for work* dana desa untuk pengembangan kawasan perdesaan dalam rangka perbaikan kinerja sektor pertanian yang menjadi penopang utama pertumbuhan daerah sekaligus untuk peningkatan kesejahteraan petani, terutama melalui penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa.
- d) Mengantisipasi perlambatan konsumsi rumah tangga dengan memastikan bahwa realisasi program bantuan sosial dan/atau subsidi terkait penanggulangan kemiskinan seperti penyaluran Program Keluarga Harapan, program bantuan pangan dan Rastra, serta program jaminan kesehatan bagi kelompok masyarakat *bottom of the pyramid* dapat berjalan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
- e) Mendorong investasi dan penciptaan sumber pertumbuhan baru non SDA melalui :
 - Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif
 - Meminimalisir hambatan investasi (peraturan/ perizinan, pajak/retribusi, infrastruktur)
 - Insentif bagi investor dan pelaku usaha/wirausaha baru seperti relaksasi pajak/retribusi, penyediaan tata ruang, bantuan

- permodalan, bantuan promosi, penyediaan SDM yang unggul melalui kerjasama dengan SMK dan Perguruan Tinggi
- Insentif khusus bagi calon investor yang membangun industri hilir penunjang komoditas unggulan Jambi
2. Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, melalui :
- a) Pelaksanaan program peremajaan tanaman (*replanting*) tanaman kelapa sawit dan karet berbasis perkebunan rakyat
 - b) Perbaikan tata niaga dan distribusi pasca produksi yang diimplementasikan dengan :
 - Membangun jaringan kelembagaan petani dengan industri pengolahan untuk mengurangi rantai perdagangan yang terlalu panjang serta mendorong terciptanya *corporate farming*.
 - Sosialisasi dan penguatan kelembagaan pasar komoditas (pasar lelang *spot* dan *forward* untuk tanaman perkebunan dan pasar agribisnis untuk tanaman hortikultura)
 - Membangun pusat informasi harga karet dan komoditas utama lainnya yang mudah diakses sampai ke level petani
 - c) Mendorong pengembangan hilirisasi industri karet yang terintegrasi meliputi industri inti, penunjang, dan industri terkait lainnya dengan memberikan kemudahan izin, pembiayaan dan pengembangan serta didukung dengan :
 - Pengembangan Balai Riset dan Standarisasi untuk mendorong penerapan teknologi tepat guna melalui penguatan laboratorium uji SNI dan sertifikasi produk
 - Membangun pendidikan vokasi yang menunjang kebutuhan pengembangan industri karet melalui kerjasama dengan institusi pendidikan di daerah.

3. Untuk menyikapi pengendalian inflasi, pemerintah daerah perlu memperhatikan proyeksi kenaikan inflasi mendatang serta potensi resiko yang perlu diwaspadai dengan :

- Melakukan pemantauan terhadap penerapan harga acuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan penjualan di Konsumen, termasuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
- Pengawasan terhadap ketersediaan cadangan bahan pokok melalui pemantauan rutin serta mendorong kerjasama dengan daerah sentra penghasil
- Pengembangan *database* TPID mencakup kondisi surplus defisit komoditas pangan daerah, pengawasan arus keluar masuk barang, perkembangan stok dan pemantauan harga
- Mendorong pengembangan sentra produksi lokal untuk komoditas bahan makanan yang menjadi penyumbang inflasi di Provinsi Jambi
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kerja TPID dan himbauan-himbauan menyangkut pengendalian inflasi

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah Provinsi Jambi diprediksi sebesar Rp4.092.302.377.817,98. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.524.642.944.190,00, dana perimbangan sebesar Rp2.566.171.433.627,98 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1.488.000.000,00. Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Jambi berasal dari pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan Bakar Kendaraan bermotor. Secara rinci perkembangan relisasi dan Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 3.11.

Tabel 3-8
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
PENDAPATAN	3.394.214.337.551,10	4.303.541.771.342,06	4.218.022.336.599,00	4.092.302.377.817,98	4.915.606.800.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.233.133.129.097,10	1.578.810.222.392,06	1.494.530.066.299,00	1.524.642.944.190,00	1.991.445.180.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	966.519.347.102,57	1.500.527.500.000,00	1.272.727.718.400,00	1.296.513.698.449,00	1.695.596.070.000,00
Hasil Retribusi Daerah	19.036.490.425,00	23.180.750.000,00	21.198.960.000,00	23.650.040.000,00	24.571.600.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.000.011.616,41	71.624.510.000,00	43.059.142.708,00	34.115.495.741,00	92.395.620.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	220.577.279.953,12	170.363.710.000,00	157.544.245.191,00	170.363.710.000,00	178.881.890.000,00
DANA PERIMBANGAN	1.547.888.628.151,00	2.723.260.588.950,00	2.703.635.858.300,00	2.566.171.433.627,98	2.172.793.220.000,00
Bagi Hasil Pajak	0,00				238.612.350.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0,00				187.965.180.000,00
Dana Alokasi Umum	1.070.452.478.000,00				1.558.250.510.000,00
Dana Alokasi Khusus	20.536.912.458,00				187.965.180.000,00
Dana Transfer Umum	395.791.297.693,00	1.788.432.915.714,00	1.719.529.762.300,00	1.719.529.762.300,00	-
Dana Transfer Khusus	61.107.940.000,00	934.827.673.236,00	984.106.096.000,00	829.177.052.550,00	-
LAIN-LAIN	613.192.580.303,00	1.470.960.000,00	19.856.412.000,00	1.488.000.000,00	751.368.400.000,00

URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	1.401.600.000,00	1.470.960.000,00	1.606.412.000,00	1.488.000.000,00	1.628.100.000,00
Dana	611.790.980.303,00	0,00	18.250.000.000,00	0,00	749.740.300.000,00
Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
Bantuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kuangan dari Prov/Pemerintah					
Tunjangan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2018

Keterangan : * APBD Provinsi Jambi 2018

**Proyeksi

***RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta taat pada peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka ditetapkan kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun 2019 meliputi :

- a. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
- b. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan asset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- c. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.
- d. Peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil Pajak, bukan pajak dan pembasruan data.
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- f. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
- g. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Pada tahun 2019, diperkirakan Pendapatan Daerah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp4,457 Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1,765 Triliun, Dana Perimbangan sebesar Rp2,066 Triliun dan Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah sebesar Rp715,58 Milyar. Pendapatan Asli Daerah diprediksi terutama berasal dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp1,500 Triliun.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan pencapaian target-target pendapatan dilakukan melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, menginventarisir dan mengoptimalkan pendayagunaan asset-aset agar dapat memberi kontribusi pada PAD, peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Dalam rangka mewujudkan senergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 serta kontribusi terhadap capaian RPJMN tahun 2019, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung, yang diarahkan untuk :

- a. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, termasuk belanja BLUD, DBHCHT dan pendampingan DAK.
- b. Pemenuhan Dana bagi Hasil kepada Kabupten/Kota
- c. Mempertahankan alokasi belanja sebesar 20 % untuk fungsi pendidikan.
- d. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2019.
- e. Mendukung Program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan nasional dan regional.

Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang dan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Belanja daerah Provinsi Jambi selama kurun waktu 4 (empat) tahun (2015-2018), cenderung mengalami peningkatan baik belanja tidak

langsung maupun Belanja Langsung. Secara Proporsi, Belanja Tidak langsung lebih besar dibandingkan Belanja Langsung. Hal tersebut dikarenakan komponen Belanja Tidak langsung tidak hanya untuk Belanja Pegawai, namun juga meliputi Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota, belanja bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa serta Belanja Tidak Terduga yang kesemuanya bukan merupakan belanja rutin, namun pada hakekatnya merupakan belanja modal atau pembangunan di Kabupaten/Kota serta bantuan langsung kepada masyarakat.

Idealnya prosentase Belanja Langsung lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung, Namun banyak program pembangunan khususnya pembangunan pertanian, pengembangan ekonomi lokal, penanganan infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pendidikan yang harus ditangani, merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota, sehingga untuk percepatan pelaksanaan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar Kabupten/Kota maka penyediaan anggaran tidak dialokasikan pada belanja langsung, karena alokasi belanja langsung merupakan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Guna membiayai implementasi rencana pembangunan daerah tahun 2019, maka proyeksi kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4,288 Trilyun yang terdiri dari : 1) Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2,626 Trilyun dan akan dipergunakan untuk belanja pegawai, hibah, bagi hasil kepada kabupaten/kota, bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa, serta belanja tidak terduga, 2) belanja langsung sebesar Rp1,661 Trilyun akan dipergunakan untuk pelaksanaan Program dan kegiatan di tiap SKPD, peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD dan belanja Urusan Wajib dan Pilihan.

Secara rinci realisasi dan proyeksi belanja daerah serta rincian belanja tiap tahun urusan kewenangan daerah Provinsi Jambi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3-9.

Tabel 3-9
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2020

URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
BELANJA	3.295.038.443.533,01	4.144.228.243.178,37	4.515.143.629.159,00	4.288.011.532.918,00	4.851.877.000.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.600.248.041.049,50	2.248.902.726.361,34	2.439.436.545.748,83	2.626.608.776.078,00	2.515.980.000.000,00
Belanja Pegawai	570.103.846.070,00	1.74.922.131.918,00	1.204.839.176.828,83	1.346.658.321.435,00	1.105.271.000.000,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
Belanja Hibah	629.014.771.300,00	498.074.390.000,00	505.226.600.000,00	505.226.600.000,00	695.336.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	1.000.000.000,00	563.200.500,00	0,00
Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	399.535.722.420,50	517.348.197.874,34	593.304.017.920,00	615.533.259.743,00	678.238.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes	1.500.245.247,00	156.720.000.000,00	129.066.500.000,00	131.066.500.000,00	86.386.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	93.456.012,00	58.345.000,00	4.000.000.000,00	25.000.000.000,00	5.307.000.000,00
Belanja Bantuan kepada Partai Politik			1.500.251.000,00	2.060.894.400,00	-
BELANJA LANGSUNG	1.694.790.402.483,51	1.895.325.516.817,03	2.075.707.083.410,17	1.661.402.756.840,00	2.335.896.000.000,00

URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
	2016	2017	2018*	2019**	2020***
Belanja Pegawai	122.473.510.695,00	175.337.225.165,60	188.784.885.818,00	0,00	184.332.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	626.769.583.222,50	827.403.166.145,45	892.932.926.301,17	0,00	777.337.000.000,00
Belanja Modal	945.547.308.566,01	892.585.125.505,98	993.989.271.291,00	0,00	1.374.227.000.000,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2018

Keterangan : * APBD 2018

**Proyeksi

***RPJMD Provinsi Jambi 2016-2021

3.2.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun – tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/deficit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jambi dari tahun 2016-2019 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah SiLPA cenderung fluktuatif, dan selanjutnya diprediksi akan semakin kecil. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah untuk pembentukan dana cadangan cadangan dan penyertaan modal.

Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk :

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2018 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun anggaran 2019, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional.
- b. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*).
- c. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- d. Membentuk dana cadangan.

Selengkapnya realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3-10
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Jambi Tahun 2016-2020

URAIAN	Realisasi		Proyeksi		
	2016	2017*	2018**	2019***	2020***
SURPLUS/(DEFISIT)	(177.910.337.966,67)	(178.583.989.302,00)	(297.121.292.560,00)	(210.709.155.100,01)	
PEMBIAYAAN DAERAH	177.910.337.966,67	178.583.989.302,00	297.121.292.560,00	210.709.155.100,01	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	177.910.337.966,67	178.583.989.302,00	297.121.292.560,00	210.709.155.100,01	
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	177.910.337.966,67	178.583.989.302,00	297.121.292.560	210.709.155.100,01	
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	177.910.337.966,67	178.583.989.302,00	297.121.292.560,00	210.709.155.100,01	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2017

